

MOBILITAS SOSIAL DAN BEBAN KULTURAL: TINJAUAN ANTROPOLOGIS FENOMENA KKN DI INDONESIA*

Safri Sairin

Tulisan ini berupaya menjelaskan latarbelakang keterpurukan bangsa dan negara kita sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu, dari perspektif Antropologi. Telah banyak pakar yang menganalisis fenomena perubahan sosial yang terjadi secara tiba-tiba itu, dengan keahliannya masing-masing, tetapi sepengetahuan saya belum banyak yang mencoba menjelaskannya dari tinjauan Antropologi secara mendalam. Analisis yang saya kemukakan ini mungkin dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi pemahaman terhadap masalah serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia itu, sehingga strategi dan upaya untuk menata kehidupan bangsa dalam menyambut Millennium ke-3 yang telah berdiri di beranda kehidupan kita, akan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Seandainya saja krisis ekonomi dan politik yang menyeret bangsa Indonesia ke jurang keterpurukan kehidupan pada pertengahan 1997 yang lalu itu hanyalah sebuah mimpi, barangkali rasa kagum dunia internasional terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia, pasti masih tetap tidak bergeser. Kesuksesan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru

telah berhasil membawa Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia. Kekaguman dunia internasional itu akhirnya menjadikan Indonesia lebih tersanjung dan mendapat julukan sebagai salah satu macan ekonomi Asia.

Memang diakui, sebelum krisis moneter menerjang jantung kehidupan bangsa Indonesia, pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, telah sukses melaksanakan pembangunan ekonomi bangsa, yang antara lain dibuktikan de-

* Tulisan ini diambil dari pidato pengukuhan Prof. Dr. Safri Sairin di depan Senat Guru Besar UGM.

ngan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tercermin dari membaiknya tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk, meningkatnya income per kapita dan berbagai indikator lainnya. Kesuksesan itu telah meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada bangsa Indonesia dan meyakini bahwa Indonesia akan mampu mengatasi berbagai tantangan global pada abad ke-21 mendatang.

Namun sebelum "mimpi" itu dapat diwujudkan, tiba-tiba saja bangsa Indonesia, dan beberapa negara Asia lainnya, dilanda badai krisis moneter, untuk kemudian diikuti pula oleh lengsernya presiden Soeharto dari singgasana kekuasaannya pada 21 Mei 1998, persis setahun satu hari yang lalu. Segala yang telah dicapai sepanjang 32 tahun itu tiba-tiba lenyap bagaikan pasir diterjang gelombang pasang. Buah dari kesuksesan pembangunan yang telah dipetik tidak mampu menjadi perisai yang kukuh untuk mengatasi bencana yang datang melanda itu. Fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini disebut-sebut sangat kuat dan kukuh, ternyata demikian rentan dan lemahnya. Berbagai teori ekonomi yang diajukan oleh para pakar untuk mengendalikan gejolak krisis itu juga ternyata tidak mangkus. Banyak yang berpendapat bah-

wa krisis ekonomi yang sedang melanda bangsa Indonesia itu tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi berhimpitan dengan berbagai dimensi kehidupan lainnya seperti politik, sosial dan budaya bangsa, yang bibitnya telah berkembang sejak lama.

Krisis ekonomi dan politik yang tengah berlangsung telah mendorong terjadinya berbagai perubahan dalam masyarakat. Perubahan sosial yang datang menyelonong begitu saja menusuk urat nadi kehidupan bangsa Indonesia, telah membuat banyak orang terperangah. Siapa yang pernah membayangkan bahwa masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai salah satu macam ekonomi Asia itu, tiba-tiba berubah menjadi kucing yang menghibakan, yang menengadahkan tangan, mengharap bantuan dari berbagai lembaga donor dunia. Krisis ekonomi dan politik yang menghempaskan kehidupan bangsa itu serta merta telah merubah wajah bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang pernah dalam mitos lama dikenal sebagai masyarakat peramah dan murah senyum, tiba-tiba telah berubah menjadi kawan manusia pemarah dan pemberang. Kemarahan itu kadangkala sangat tidak masuk akal. Hanya disebabkan hal-hal yang

sepele telah menyulut kemurkaan yang tidak pernah terbagikan sebelumnya.

Wujud kemarahan itu ada yang diekspresikan dengan sedikit "sopan" seperti pelecehan dan penghujatan dengan kata-kata, tetapi ada pula yang kasar dan brutal yang diekspresikan dalam bentuk penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan. Seolah dalam dada masyarakat Indonesia sedang menggelegak dendam kesumat yang perlu segera dibayar. Nilai-nilai dasar (*basic value*) yang seharusnya menjadi pedoman perilaku masyarakat seolah kehilangan fungsinya. Begitu pula nilai-nilai instrumental seperti kuwalat dan dosa seakan kehabisan maknanya, bahkan seakan sudah dilupakan dan dibuang ke tempat jauh. Kemanakah larinya nilai-nilai itu dan mengapa nilai-nilai itu begitu saja lenyap dari kehidupan kita?

Jika sudah demikian rumitnya masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, akan mampukah bangsa ini menghadapi persaingan pasar bebas yang merangkak secara pasti ke tengah kehidupan bangsa ini, sementara situasi ekonomi dan politik Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir? Tentu tidak mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Berbagai faktor turut ambil bagian

dalam situasi yang rumit itu.

Salah satu dari mata rantai panjang penyebab krisis ekonomi dan politik Indonesia saat ini adalah karena pemerintahan Orde Baru penuh dengan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Praktik KKN itu tidak hanya berlangsung secara insidental, tetapi telah menjelma menjadi jaringan kegiatan yang tidak mudah putus, dan bahkan telah menjelma dalam bentuk yang terorganisir (Anderson, 1990). Membiarkannya praktik KKN ini menggambarkan wajah bangsa yang paradoksal. Upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat telah dilaksanakan secara teratur, sementara praktik KKN yang jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang sedang dibudayakan itu terus tumbuh dengan subur tanpa dapat dicegah. Ironisnya sebagian mereka yang terlibat KKN itu diperkirakan tentu sudah pernah pula mengikuti penataran P4, bahkan mungkin sudah menjadi manggala penataran pula. Berbagai usaha untuk mengikis praktik KKN yang merugikan masyarakat itu jarang sukses, bahkan sering kandas terbentur benteng-benteng struktural maupun kultural.

Istilah KKN yang menjadi titik tolak pembicaraan kali ini sebenarnya berasal dari tiga kon-

sep yang berbeda-beda, namun ketiganya bermuara kepada pemahaman yang sama, yaitu menyangkut praktik penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan diri sendiri, kelompok atau lembaga lainnya, sehingga merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, konsep Kolusi dan Nepotisme sebenarnya juga berarti korupsi, karena dibalik praktik Kolusi dan Nepotisme itu juga berlangsung penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan diri dan kalangan sendiri, dengan mengorbankan kepentingan orang banyak (Raharjo, 1999: 26-27).

Sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik korupsi dapat berlangsung secara mulus karena dilakukan dengan cara-cara kolusi atau memanfaatkan hubungan-hubungan yang bercorak nepotisme (Sairin, 1999: 34). Skandal korupsi yang dilakukan oleh Eddy Tanzil adalah contoh paling populer dari praktik kolusi yang dilakukannya dengan seorang pejabat penting Indonesia pada masa Orde Baru. Dengan katebelece dari pejabat ini, yang bersangkutan dengan mudah mendapatkan dana yang begitu besar dari negara untuk kemudian menyelengkapannya. Begitu pula de-

ngan praktik nepotisme yang dilakukan oleh berbagai kalangan pejabat pemerintah, dengan memberi kesempatan untuk memenangkan tender proyek-proyek tertentu kepada kerabat atau *konco-konco* dekatnya. Oleh karena itu, walaupun yang menjadi fokus perhatian dari pembicaraan ini adalah fenomena KKN, tetapi sebenarnya yang diulas adalah fenomena korupsi.

Meskipun praktik KKN dapat saja melibatkan sejumlah individu terbatas, tetapi KKN sebagai konsep hanya dapat dikenakan dalam konteks organisasi, terutama organisasi yang disebut dengan negara (Abdullah, 1999). Jika praktik yang sama dilakukan di kalangan sendiri dan tidak merugikan publik, maka praktik itu tidak dapat dikategorikan sebagai KKN. Jadi kalau ada sekelompok orang melakukan praktik semacam KKN di lingkungan perusahaan milik keluarga sendiri, dan tidak merugikan sama sekali kepentingan masyarakat luas, maka praktik tersebut tidak dapat dikatakan dengan KKN.

Praktik KKN sebenarnya adalah fenomena di banyak negara dan bukan sesuatu yang baru dalam kehidupan bangsa Indonesia. Praktik itu sudah hadir sejak Indonesia merdeka. Pada awal kemerdekaan, di kenal isti-

lah *kong kali kong* atau TST (Tahu Sama Tahu) yang artinya tidak berbeda dengan apa yang dilakukan dalam praktik KKN itu (Abdullah, 1999: 9). Pada masa itu bahkan sudah terdapat beberapa pejabat negara yang ditengarai dan bahkan diadili karena terlibat dalam korupsi (Raharjo, 1999). Namun, virus praktik tidak terpuji itu semakin meluas sepanjang pemerintahan Orde Baru, dan nampaknya masih berlangsung sampai saat ini.

Dengan meluasnya gejala korupsi itu Bung Hatta, Proklamator dan mantan Wakil Presiden R.I., sepakat dengan pendapat Suhartini, seorang Dosen Universitas Gadjah Mada, bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia (Noer, 1990: 684). Begitu membudayanya praktik korupsi itu sampai-sampai sebuah media internasional menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling korupsi di Asia (Muhammad, 1999). Mengapa praktik KKN itu begitu meluas dalam kehidupan bangsa Indonesia? Memang tidak mudah menjawab pertanyaan itu, karena masalah ini menyangkut berbagai dimensi kehidupan bangsa, baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. M. Amien Rais dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Gadjah Mada pada 10 April yang lalu, mengemukakan bahwa tuna kuasa yang dimiliki oleh masyarakat adalah salah satu penyebab dari praktek KKN itu berkembang secara luas (Rais, 1999). Analisis Amien itu tentu saja mengandung berbagai kebenaran. Akan tetapi, praktik KKN itu dapat pula berlangsung karena didorong oleh beragam faktor lainnya.

Praktik KKN dapat pula terjadi karena rendahnya gaji yang diterima oleh pegawai. Gaji yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar, dapat menjadi pendorong yang kuat untuk melakukan KKN. Pada awal kemerdekaan, Bung Hatta telah mengingatkan bagaimana pentingnya memberikan gaji yang memadai kepada pegawai, agar mereka dapat hidup berkecukupan dan tidak terjerembab untuk melakukan korupsi (Noer, 1990: 684). Dr. A. Halim, Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1950 bahkan menulis surat terbuka kepada Presiden Soekarno, dan menyatakan dengan tegas bahwa gaji pegawai yang hanya cukup untuk hidup untuk dua minggu atau paling lama 20 hari, telah menyebabkan mereka mau menjual harga dirinya dan melibatkan diri dalam korupsi kecil-kecilan (*minor corruption*), sekali

atau dua kali seminggu (Feith, 1962). Sayang, surat peringatan itu tidak pernah mendapat perhatian Soekarno, dan gaji pegawai negeri tetap saja tidak memadai untuk menopang kehidupan mereka. *Minor corruption* pada sejumlah pegawai negeri tingkat bawah itu tetap saja berlangsung sampai saat ini. Kemampuan ekonomi yang sangat terbatas menyebabkan mereka berupaya untuk menambah income mereka dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada disekitar tempat mereka bertugas, baik secara sendirian maupun bersama-sama. Ada yang melakukannya dengan memanipulasi nota pembelian, dan ada pula yang memanfaatkan jabatan mereka dengan melakukan pungutan liar dan sebagainya. Praktik seperti inilah yang memunculkan berbagai istilah seperti uang pengganti kertas, uang rokok, uang kopi dan sebagainya. Praktik yang telah tumbuh sejak awal kemerdekaan Indonesia itu berlangsung lebih transparan pada masa Orde Baru.

Tentu tidak semua pegawai rendah mau terlibat dalam praktik KKN itu. Selain peluang yang sangat terbatas, mungkin juga karena nilai-nilai moral dasar yang mereka miliki cukup kukuh dan tidak mudah goyah dengan godaan kehidupan. Untuk menutupi kekurangan gaji yang

tidak memadai itu, mereka secara kreatif berusaha menemukan peluang baru dengan membuka usaha-usaha sampingan sesudah jam kerja. Ada yang membuka kios bensin, membuka bengkel, menjadi tukang ojek, memberikan les privat atau mengerahkan tenaga kerja keluarga untuk menambah penghasilan. Sebagian lain, terutama yang telah kematian akal, terjerumus pada kegiatan perjudian, mendatangi tempat-tempat keramat atau memohon bantuan orang-orang pintar, untuk mendapatkan keberuntungan guna mengatasi himpitan kehidupan yang tidak tertanggungkan itu. Cara yang terakhir ini kabarnya jarang yang sukses. Selain itu, tentu tidak kurang pula jumlah mereka yang menerima tuntutan hidup yang semakin berat itu dengan bersikap apa adanya, dan menyerahkan nasibnya kepada Tuhan Yang Maha Esa (*nrimo*).

Cukup atau tidaknya gaji atau penghasilan seseorang sangat relatif ukurannya, bahkan sering tidak mudah untuk menentukannya. Mungkin dalam ukuran-ukuran standard yang berlaku dalam masyarakat, sejumlah gaji tertentu sudah dipandang cukup untuk menjalani kehidupan secara wajar. Namun, dalam keadaan lain mungkin saja jumlah gaji yang

sama dianggap kurang memadai. Dalam keadaan yang demikian, faktor mentalitas menjadi sangat penting berperan dalam menentukan ukuran itu. Banyak orang yang jumlah gaji yang diterimanya sudah lebih dari memadai, tetapi tetap saja merasa kekurangan. Ini jelas berkaitan dengan sifat manusia yang selalu tidak cepat merasa puas dengan apa yang telah diperolehnya. Tentu saja pengaruh lingkungan sosial turut memainkan perannya di sini.

Membiaknya praktik KKN jelas berkaitan erat dengan faktor mentalitas seperti ini, dan tidak berhubungan secara langsung dengan tinggi atau rendahnya tingkat penghasilan. Mentalitas yang dapat menjerumuskan orang pada praktik KKN itu adalah mentalitas "selalu merasa kekurangan" (*unsatiabile mentality*). Mereka yang memiliki mentalitas ini sepertinya tidak akan pernah merasa puas dengan penghasilan yang telah mereka capai, walaupun menurut standar umum, sebenarnya penghasilan itu sudah cukup untuk menopang kehidupan mereka secara wajar. Keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak tidak pernah terhenti sehingga terkesan menjurus ke arah serakah. Untuk memuaskan "rasa kurang" itu mereka menempuh berbagai jalan,

baik yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan etika, maupun yang berlawanan dengan itu. Bagi mereka yang penting adalah bagaimana dahaga *unsatiabile mentality* yang bersarang dalam diri mereka itu dapat dengan cepat terpuaskan.

Jika saja mereka yang memiliki mentalitas seperti itu dapat mengarahkannya kepada peningkatan etos kerja, tentu saja akan menghasilkan hal-hal yang positif. Akan tetapi, banyak yang kemudian hanyut ke arah yang berlawanan. Dalam benak mereka yang ada hanya keinginan untuk segera memuaskan nafsu keserakahan yang bertengger di hati mereka itu, tidak peduli apakah hasil yang diperolehnya itu didapat secara halal atau tidak. Mereka inilah yang banyak terjerumus kepada praktik KKN yang merusak tatanan sosial itu.

Di sisi lain, praktik KKN dapat pula disebabkan oleh beratnya beban kultural (*cultural burden*) yang menggayut di bahu masyarakat. Kata "beban" dalam kehidupan kita sehari-hari digunakan untuk banyak hal. Kata beban dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu tanggungan yang bersifat material, seperti beban memikul barang, beban mengangkat kayu dan sebagainya. Namun, kata itu dapat pula dikaitkan dengan tanggungan yang bersifat non-

material. Beban non-material ini dapat dibagi dua yaitu beban sosial dan beban kultural. Walaupun benang pemisah antara konsep beban sosial dan beban kultural sangat tipis, tetapi keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Pengertian beban sosial berhubungan dengan berbagai tanggungan dan kewajiban yang dipikul manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat seperti beban yang ditanggung oleh mereka yang kena pemutusan hubungan kerja, penganggur atau pegawai rendah yang tidak mampu untuk menanggung pendidikan anak-anaknya. Konsep beban kultural berbeda dengan pengertian beban sosial itu.

Beban kultural tidak berkaitan sama sekali dengan tanggungan dan kewajiban manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial. Konsep beban kultural berkaitan dengan tanggungan atau kewajiban yang dipikul manusia berupa seperangkat nilai-nilai, baik yang dibangun oleh kelompok primordialnya ataupun yang datang dari luar. Tanggungan dan kewajiban yang melekat pada beban kultural itu akan menjadi lebih berat ketika masyarakat mengalami mobilitas sosial secara vertikal dan tiba-tiba dan keluar dari alur kehidupan yang sudah lama digelutinya.

Secara sederhana konsep beban kultural itu dapat dikenakan misalnya kepada petani yang secara tiba-tiba beralih status menjadi pegawai negeri, atau anggota ABRI yang tiba-tiba beralih tugas menjadi pejabat sipil atau seseorang yang tiba-tiba diangkat menjadi pejabat dalam kedudukan yang sangat penting. Mobilitas vertikal yang berlangsung dalam satu alur kegiatan, seperti seorang pegawai negeri yang berpindah status secara vertikal karena kenaikan pangkat, atau seorang petani penggarap yang beralih menjadi petani pemilik, tidak dapat dikenakan konsep beban kultural, tetapi lebih dekat dengan konsep beban sosial. Hal ini terutama disebabkan perpindahan status seperti itu berlangsung melalui serangkaian proses yang telah dipersiapkan dan diperkirakan sebelumnya kecuali mereka sendiri yang merasa bahwa perpindahan status itu begitu berarti bagi mereka. Oleh karena itu, hanya mereka yang mengalami mobilitas vertikal dengan melompat alur secara tiba-tiba, dan tanpa diperkirakan sebelumnya, yang akan terkena dengan konsep beban kultural ini.

Perpindahan status dapat terjadi antara lain karena dipicu oleh perubahan sosial yang terjadi secara revolusioner dan besar-besaran. Setiap perubahan

sosial yang terjadi secara revolusioner dan diikuti dengan mobilitas sosial secara tiba-tiba, akan membawa berbagai beban kultural pada masyarakat yang mengalaminya. Victor Turner (1976) mengatakan bahwa masyarakat yang mengalami proses perpindahan status seperti itu akan terjadi suatu fase perpindahan yang disebutnya dengan istilah *liminality*. Dalam fase seperti itu masyarakat yang terlibat belum beranjak dari status lamanya secara keseluruhan dan belum pula menginjak status barunya dengan seutuhnya. Mereka diibaratkan sedang berdiri di sebuah pintu gerbang, "tidak berada di sini dan tidak pula berada di sana"; tidak berada dalam budaya lamanya dan tidak pula dalam budaya baru yang sedang dikejutkannya. Mereka berada dalam suasana ambiguiti dan galau. Untuk begitu saja meninggalkan nilai-nilai dan simbol-simbol budaya dari kehidupan masyarakat yang ditinggalkannya tidak mungkin sama sekali, karena terdapat berbagai hal yang telah menyatu dalam kehidupan mereka. Untuk segera menyerap nilai-nilai baru dari dunia yang baru saja dimasukkannya juga tidak mudah, terutama karena makna nilai-nilai dan simbol-simbol baru itu belum mereka pahami sama sekali. Mereka yang sedang dalam

keadaan *liminality* itu hanyut kepada satu bentuk *communitas* (kelompok masyarakat yang dibayangkan) yang memiliki sistem nilai dan simbol-simbol sendiri yang berbeda dengan masyarakat lainnya. "Warga" *communitas* inilah yang banyak menanggung beban kultural seperti yang dimaksudkan di atas, baik yang berasal dari budaya lamanya ataupun yang dikonstruksikannya dari unsur-unsur budaya baru yang sedang dikejutkannya.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, paling tidak terdapat dua peristiwa penting yang berhasil mendorong terjadinya perubahan sosial secara besar-besaran, dan memicu berlangsungnya mobilitas sosial vertikal secara besar-besaran pula dalam masyarakat. Peristiwa pertama adalah ketika bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari tangan penjajahan Belanda, dan peristiwa kedua, adalah ketika pemerintah Orde Baru mendapatkan sukses besar dalam melaksanakan pembangunan ekonomi pada awal tahun 1970. Meminjam terminologi Umar Kayam (1989), kedua peristiwa penting itu merupakan "perintah historis" yang begitu kuat mendorong terjadinya perubahan dalam sejarah sosial masyarakat Indonesia.

Tidak lama setelah bangsa In-

donesia berhasil merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda, dengan segera terjadi perubahan besar-besaran dalam kehidupan masyarakat. Jika sepanjang masa penjajahan golongan pribumi Indonesia terpuruk pada lapisan terbawah dari struktur sosial pada masa itu, maka begitu kemerdekaan sudah berada dalam genggaman bangsa Indonesia, kaum pribumi segera mengambil alih kekuasaan negara, menggantikan kedudukan yang telah ditinggalkan oleh penjajah. Peristiwa ini memacu berlangsungnya mobilitas sosial vertikal secara besar-besaran.

Pada masa penjajahan, penguasa bangsa Belanda dan kaum minoritas kulit putih lainnya berada pada puncak struktur masyarakat jajahan. Di lapisan bawah terpuruk anak negeri, kaum pribumi Indonesia, yang berada di bawah tindasan para penguasa Belanda. Sementara itu di tengah struktur berada para imigran bangsa Timur Asing, dengan mayoritas orang Tionghoa, yang berkedudukan sebagai perantara atau *broker* antara pribumi dengan penjajah yang berkuasa. Corak pelapisan sosial yang demikian itu disebut oleh Furnivall (1948) dengan istilah *plural society*. Kaum kulit putih dengan kekuasaan besar yang berada di dalam genggaman-

annya telah berhasil meraup keuntungan ekonomi yang luar biasa, sedangkan mayoritas penduduk pribumi, dengan pengecualian sejumlah kecil kaum bangsawan, relatif tidak mendapatkan apa-apa, meskipun tanah dan tenaganya dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi kaum penjajah. Imigran Tionghoa dan bangsa Timur Asing lainnya, yang berperan sebagai perantara yang menjembatani kepentingan penguasa kulit putih dengan kaum pribumi, memperoleh keuntungan besar dari sistem itu, dan telah membawa mereka pada kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan kehidupan kaum pribumi. Pengalaman sebagai perantara yang mereka dapatkan selama masa penjajahan, telah menjadi modal utama bagi mereka untuk tetap memainkan peranannya sebagai perantara ketika Indonesia telah berhasil menjadi bangsa merdeka, bahkan peranan ini relatif tidak bergeser sama sekali sampai saat ini.

Tatkala bangsa Indonesia telah berhasil mengusir penjajah Belanda pada tahun 1945, gelombang besar perubahan sosial segera terjadi dalam masyarakat. Kemerdekaan itu telah membuka berbagai peluang bagi masyarakat Indonesia untuk menduduki posisi-posisi strategis yang selama ini berada di dalam

genggaman penjajah Belanda. Kaum terdidik pribumi yang umumnya berasal dari kalangan bangsawan dan para pejuang kemerdekaan, yang mayoritas berasal dari kalangan rakyat biasa, segera mengisi peluang yang ditinggalkan penjajah itu. Merekalah yang berada di garda terdepan mengisi kantong-kantong kekuasaan yang ditinggalkan oleh kaum penjajah itu.

Beriringan dengan mobilitas sosial vertikal gelombang pertama yang berlangsung dengan mantap itu, kalangan rakyat biasa yang selama masa penjajahan tidak mungkin memasuki dunia pendidikan formal, segera pula mendapat kesempatan luas memasuki sekolah-sekolah yang dibuka oleh pemerintah. Sekolah Rakyat (SR) didirikan secara besar-besaran di berbagai pelosok Indonesia. Rakyat dari kalangan bawah didorong untuk memasukkan anak-anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan yang tersedia. Berbagai fasilitas belajar disediakan negara agar tidak merepotkan masyarakat. Bagi murid-murid sekolah disediakan batu tulis (*sabak*), buku, tinta, mata pena dan buku bacaan. Untuk mengisi lowongan jabatan yang ditinggalkan oleh Belanda, berbagai sekolah kejuruan dibuka pula oleh pemerintah. Dibidang hukum, perintah membuka Sekolah Hakim dan Jaksa

(SHD). Untuk memenuhi kebutuhan guru dibuka pula Sekolah Guru Bawah (SGB). Dibidang lainpun pemerintah membuka sekolah-sekolah kejuruan yang dapat menghasilkan pegawai-pegawai baru. Hampir semua murid sekolah kejuruan itu mendapat ikatan dinas. Sejalan dengan upaya itu, pemerintah mulai pula membuka lembaga pendidikan tinggi, yang diawali dengan membuka Univertas Gajah Mada pada akhir 1949, kemudian diikuti oleh lembaga pendidikan tinggi lainnya, mendampingi universitas yang telah berdiri sejak masa penjajahan dan awal kemerdekaan. Begitu menyelesaikan studi mereka langsung menjadi bagian dari birokrasi negara yang baru merdeka itu. Para lulusan lembaga-lembaga pendidikan inilah yang kemudian mengisi berbagai lowongan pekerjaan di birokrasi pemerintahan yang semakin bertambah dari waktu ke waktu.

Mobilitas sosial vertikal secara besar-besaran dari kalangan pribumi yang tidak terdidik menjadi kaum terdidik ini, telah mengubah struktur wajah bangsa Indonesia. Mereka yang selama masa penjajahan merupakan bagian dari masyarakat "*blue collars*" berpindah status menjadi kelompok "*white collars*". Dengan meminjam terminologi Jawa, sejumlah *wong cilik* telah

berpindah menjadi *priyayi*, sebuah perpindahan status yang sangat menyolok dalam sejarah kehidupan bangsa.

Perpindahan status yang berlangsung secara besar-besaran ini telah membawa berbagai beban kultural pada *communitas* ini. Berbagai nilai yang berasal dari kelompok sosial lamanya menyatu dengan nilai-nilai yang berasal dari kelompok sosial yang baru dijakinya. Nilai-nilai ini menjadi beban kultural yang cukup berat untuk dipikul mereka. Sebagai anggota masyarakat yang berasal dari kalangan biasa, tentu saja tidak mudah bagi mereka untuk menanggalkan semua nilai-nilai lama yang pernah menjadi bagian dari kehidupannya. Berbagai nilai yang diamanatkan kepadanya seakan mengganggu suasana batinnya, baik berupa keharusan untuk segera memenuhi tuntutan nilai-nilai dari kelompok primordialnya maupun nilai-nilai yang tumbuh dari dunia baru yang dijakinya. Dengan status baru yang disandanginya itu, serta merta berbagai nilai-nilai baru segera pula melekat pada dirinya, baik berupa simbol-simbol material seperti bentuk rumah dan perlengkapannya, maupun yang bersifat non-material seperti gaya hidup.

Beban kultural itu menjadi bertambah berat ketika nilai-nilai

yang berkaitan dengan keharusan untuk memperhatikan kepentingan kelompok primordialnya seperti keluarga dan kerabat, menjadi suatu tanggungan yang tidak dapat diabaikannya begitu saja. Beban yang dipikul itu dapat berupa penyediaan dana, mencarikan pekerjaan, kewajiban untuk mewujudkan simbol-simbol kultural dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang menyatu dalam kewajiban untuk memperhatikan kepentingan kelompok primordial seperti itu adalah salah satu ciri dari masyarakat negara berkembang. Kewajiban yang menyatu dengan nilai-nilai budaya seperti inilah yang menjadi alasan kuat bagi berlangsungnya praktik nepotisme dalam kehidupan birokrasi negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara maju, yang mampu menghambat praktik semacam itu dengan menerapkan berbagai peraturan dengan ketat (Fox, 1973). Membantu keluarga dan kerabat melalui praktik nepotisme merupakan pelaksanaan dari amanat yang menyatu dengan nilai budaya masyarakat sehingga menjadi beban kultural bagi banyak orang. Meskipun sering dikeluhkan, tetapi praktik nepotisme ini sukar untuk dikikis.

Nilai-nilai yang melandasi

praktik membantu keluarga atau kerabat itu sebenarnya berakar pada prinsip *reciprocity* yang umumnya melekat pada kebudayaan masyarakat negara-negara berkembang (Dalton, 1968 dan Ekeh, 1974). Pada masyarakat seperti itu setiap "pemberian" harus dikembalikan. Pengasuhan dan kasih sayang yang diberikan oleh keluarga dan kerabat ketika masih dalam usia muda adalah sebagai pemberian. Pemberian itu harus dikembalikan ketika mereka sudah mampu berdiri sendiri. Prinsip *reciprocity* ini terjalin erat dalam aktivitas sosial yang disebut dengan pertukaran sosial (*social exchange*).

Betapapun beratnya beban kultural itu, tetapi nilai-nilai yang melekat pada beban itu selalu menggayuti bahu. Pada saat kritis seperti itulah orang harus pandai-pandai untuk menentukan sikap. Jika salah langkah, orang dapat terjerumus pada praktik-praktik KKN yang merugikan banyak orang itu.

Tatkala pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa, beban kultural itu semakin membebani bahu masyarakat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang cukup mencengangkan pada periode itu telah membuat kantong pemerintah menjadi mem-bubung. Dana yang terkumpul

itu selain digunakan untuk membayar utang kepada negara-negara donor, juga dimanfaatkan untuk membangun dan mengembangkan berbagai sarana masyarakat. Berbagai lowongan pekerjaan dibuka secara luas dan sejumlah besar kaum terdidik yang umumnya berasal dari kalangan *wong cilik* itu mulai memasuki periode baru dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pada saat inilah terjadinya mobilitas sosial kaum terdidik secara besar-besaran untuk kedua kalinya. Seiring dengan itu berbagai jabatan yang dipandang strategis dan rawan diisi pula oleh sejumlah ABRI yang dikaryakan. Berbagai proyek yang berkaitan dengan pembangunan mulai pula dikembangkan. Hal ini mendorong pula berkembangnya sektor swasta.

Kata "proyek" menjadi sebuah kata sangat bermakna ketika itu, karena dikaitkan dengan simbol-simbol keberhasilan materi. Di wilayah kerja yang diperkirakan banyak mendapatkan proyek lalu disebut sebagai tempat "basah", sedangkan yang kurang, dianggap tempat "kering". Artinya cukup jelas, bahwa mereka yang terlibat dalam proyek di tempat-tempat basah itu akan mendapat keuntungan besar, sedangkan yang tidak tentu terpaksa menerima nasib saja. Disinilah kemudian

awal berkembangnya jaringan-jaringan pekerjaan yang relatif tertutup dan terorganisir. Jabatan-jabatan di tempat-tempat basah selalu menjadi rebutan. Oleh karena itu, dalam berbagai kasus tidak jarang orang yang berusaha merebut jabatan itu tidak ragu-ragu menyediakan dana yang cukup besar sebagai uang balas jasa kepada pejabat yang berwenang memutuskan. Konsep penguasa tunggal yang diperkenalkan pemerintah Orde Baru menyebabkan sistem pengangkatan pejabat pada tempat-tempat basah itu berjalan dengan mulus, tanpa halangan yang berarti. Politik otoriter yang dikembangkan pemerintah lebih mempermudah urusan-urusan itu. Keadaan seperti itu sudah menjadi pengetahuan umum dan ini pulalah yang memacu berkembang praktik KKN yang merugikan rakyat banyak itu.

Bobot beban kultural menjadi semakin memberat dengan berlangsungnya proses globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan pembangunan yang relatif terbuka telah membuka peluang baru bagi masuknya berbagai produk industri dari negara-negara maju ke tengah denyut jantung kehidupan masyarakat. Walaupun sebagian besar produk itu baru dapat dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan, tetapi corak kehi-

dupan baru telah mengalir ke relung-relung kehidupan masyarakat pedesaan. Kemajuan teknologi komunikasi yang menyertai penetrasi produk industri asing itu telah menjadi sarana penting bagi pengkayaan gagasan-gagasan masyarakat. Tanpa dirasakan masyarakat Indonesia telah menjadi objek pasar bagi produk negara-negara asing. Telah terjadi semacam bentuk penjajahan baru dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang melalui pengembangan pasar (Said, 1993), dan menghasilkan sebuah pola kehidupan yang disebut dengan *consumer culture* (Featherstone, 1991).

Luar negeri *minded* yang telah lama berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, telah menjadi pendorong ke arah terbentuknya pola budaya konsumen. Begitu arus produk massa yang dihasilkan industri mulai dikonsumsi masyarakat begitu pula masyarakat itu terperangkap pada budaya itu (Bodley, 1975), untuk kemudian berkembang dalam wujud pola kehidupan konsumerisme. Salah satu ciri dari perilaku konsumerisme adalah mengkonsumsi sesuatu produk bukan dalam rangka kegunaan (*utility*), tetapi lebih berat pada pertimbangan nilai (*value*) yang melekat pada produk itu. Sesuatu produk bukan lagi

dilihat dari fungsi substansialnya, tetapi lebih ditekankan pada makna yang melekat pada produk tersebut. Di sini produk itu telah berubah menjadi sesuatu yang memiliki makna simbolik. Dalam mengkonsumsi suatu produk orang lebih mementingkan *image* yang melekat pada produk itu daripada kegunaannya. Produk itu lebih dilihat dari hubungannya dengan citra, kemewahan dan kenikmatan-kenikmatan baru. Semakin langka dan terbatas suatu produk, semakin tinggi pula makna simbolik yang melekat pada benda itu.

Dengan bantuan teknologi informasi yang semakin canggih, produk industri yang umumnya datang dari negara-negara maju itu, terutama Amerika, mengalir deras ke tengah kehidupan masyarakat. Selain memiliki nilai guna (*utility*) sesuai dengan kegunaan yang telah ditentukan oleh pabrik penghasil, masyarakat sendiri membangun makna (*value*) simbolik terhadap produk itu, terutama simbol-simbol yang berkaitan dengan citra kemewahan dan gengsi. Akibat dari kecenderungan konsumerisme akan produk-produk impor itu beban kultural yang harus dipikul masyarakat semakin berat, apalagi umumnya masyarakat tidak lagi melihat dirinya sekadar anggota dari suatu ke-

lompok primordial atau warganegara dari sebuah negara yang namanya Indonesia, tetapi telah membayangkan kehadirannya sebagai warga dunia.

Mengapa citra kemewahan dan gengsi merupakan ciri yang menonjol pada fenomena konsumerisme? Mary Douglas dan Isherwood mengatakan bahwa hal itu sangat berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk *display* atau pameran pada lingkungan sekitarnya. Kebutuhan "*pamer*" pada dasarnya berkaitan erat dengan tuntutan kehidupan masyarakat itu sendiri, yang memang memerlukan semacam persaingan dalam kehidupannya (Douglas dan Isherwood 1979). Oleh karena itu tidak perlu diherankan apabila dalam mengisi kebutuhan pameran itu, orang dipaksa untuk memilih produk yang dapat dipertontonkan kepada umum. Produk yang tidak pantas untuk dipamerkan tidak segera dikonsumsi.

Apakah kebutuhan untuk pameran ini merupakan sebuah pertanda bahwa rasa percaya diri pada komunitas cukup rendah? Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu dengan segera. Akan tetapi jika memang asumsi itu mengandung kebenaran, maka sebenarnya produk yang dikonsumsi itu tidak lebih dari seperangkat topeng yang dipakai untuk me-

nutupi rasa kurang percaya diri yang bertengger dalam hati orang. Diperlukan serangkaian penelitian yang mendalam memang untuk membuktikan asumsi itu.

Meskipun kecenderungan kuat untuk mengkonsumsi produk yang berasal dari negara industri maju semakin meningkat, dari waktu ke waktu tetapi produk lokal yang mempunyai makna simbolik tidak begitu saja dibuang jauh. Produk itu tetap saja dipertahankan walaupun tidak secara utuh. Berbagai produk impor maupun lokal yang dapat memberikan citra mewah dan klasik umumnya diambil sepotong-sepotong dan itu pun diambil bagian permukaannya saja. Kedua simbol yang berasal dari dua dunia yang berbeda itu kemudian dipadukan menjadi satu menjadi pola yang serba tanggung dan tidak jelas rujukannya. Aspek imitatif menjadi menguat, baik dengan membangkitkan kembali nilai-nilai lokal maupun memungutnya dari simbol-simbol masyarakat maju yang dijadikan acuan. Terjadi perpaduan dua dunia yang berbeda dalam corak yang khas sebagai hasil konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Ambiguiti dan kegalauan yang mengental dalam pola kehidupan seperti itu seakan memaksa masyarakat untuk meng-

adopsi kedua sistem budaya itu secara bersamaan, meskipun akhirnya yang diambil lebih banyak unsur-unsur budaya material (*cultural artefacts*), bukan nilai yang ada dibalik benda-benda itu. Situasi seperti ini disebut oleh Appadurai (1991) sebagai *imagined worlds* di mana orang membayangkan berbagai pola dan model kehidupan yang sedang berlangsung di dunia, baik yang berasal dari kelompok primordialnya, bangsanya, ataupun dunia yang lebih luas di luar itu. Dengan keinginan kuat untuk merengkuh segala model kehidupan itu membuat beban kultural semakin memberat, sementara untuk menanggulangnya tidak selalu mudah, terutama karena membutuhkan dana yang cukup besar.

Laporan *harian Kompas* pada 25 Maret 1999 melukiskan sebuah kasus kecil tentang beban kultural yang menggayuti karyawan Bank di Indonesia. Sesuai dengan status yang disandangnya, setiap hari kerja para karyawan Bank itu diharuskan untuk memakai dasi, selain asesoris seperti jas, sepatu, dan parfum. Semuanya mesti merek kelas atas, buatan luar negeri.

"Begitulah, kami mesti menyesuaikan penampilan dengan klien kami. Padahal sebenarnya kami getir, karena penampilan ini sebenarnya tidak sepadan dengan gaji yang

ada" ... Beban semakin berat ketika berhadapan dengan lingkungan rumah, bahkan dengan keluarga sendiri... "Anak saya bangga Bapaknya kerja di bank walaupun tidak tahu berapa gajinya".. Apabila ada permintaan sumbangan dia termasuk prioritas diminta".

Hidup dalam masyarakat yang terjat dalam pola hidup konsumerisme memang sering terasa membebani kehidupan. Beban kultural yang memberati seakan tidak mungkin untuk dielakkan begitu saja. Padahal untuk memenuhi tuntutan kehidupan konsumerisme itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Semisal saja tingkat penghasilan cukup memadai untuk memenuhi tuntutan beban kultural itu, tentu tidak menjadi persoalan benar. Akan tetapi, jika *income* begitu terbatas, sedangkan godaan untuk memenuhi tuntutan itu tidak dapat diredam, maka sudah dapat dibayangkan apa yang akan dilakukan orang. Pada saat itulah mental *nrabas* yang menjadi salah satu ciri masyarakat Indonesia itu mulai memainkan peranannya.

Pada awal pemerintahan Orde Baru Koentjaraningrat telah mengingatkan tentang kelemahan mentalitas bangsa Indonesia yang dipandang punya potensi untuk merintang pembangunan, yaitu mentalitas *nrabas* (Koentjaraningrat, 1969).

Bapak ahli Antropologi Indonesia itu mengatakan bahwa mentalitas seperti ini tidak cocok untuk menopang pembangunan, bahkan dapat menjadi kendala dan rintangan bagi upaya pembangunan Indonesia itu sendiri. Hal ini terutama karena mereka yang mempunyai mentalitas *nrabas* itu selalu menghindari kerja keras, disiplin tinggi dan rasa tanggung jawab. Mereka lebih suka mencari jalan pintas walaupun harus melakukannya dengan cara-cara melanggar etika dan aturan, yang pada akhirnya menyeret orang kepada perilaku KKN.

Mentalitas *nrabas* menyebabkan hilangnya rasa malu (*shameless*) perasaan "tidak enak", ewuh pekewuh, bahkan nilai-nilai instrumental seperti dosa, kuwalat dan haram sudah lenyap dari perbendaharaan hidupnya. Orang lebih mementingkan bagaimana dapat dengan segera melepaskan dahaga konsumerisme yang telah bersarang dihatinya itu, walaupun harus merugikan banyak orang dengan melalui praktik KKN. Seringkali hasil KKN tidak cukup untuk memenuhi beban kultural tersebut. Untuk menambah penghasilan yang lebih besar, tidak jarang mereka melakukan berbagai upaya yang sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan tegel (*heartless*) (Sairin,

1995), seperti memotong honorarium bawahan, memotong dana proyek, memanipulasi dana untuk orang miskin seperti Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), dana Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dan bahkan kalau perlu dengan cara kekerasan.

Praktik KKN telah menyebabkan manisnya kue pembangunan hasil adonan pemerintah Orde Baru hanya sempat dicicipi oleh sekelompok kecil orang saja, sedangkan mayoritas rakyat relatif kurang mendapat kesempatan (Booth dan McCawley, 1981). Hampir di semua tingkat birokrasi pemerintahan praktik KKN berlangsung tanpa gangguan yang berarti. Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, pakar ekonomi senior Indonesia, menyebutkan bahwa sekitar 30 persen dari anggaran pembangunan mengalami kebocoran. Fuad Bawazier, mantan menteri Keuangan Republik Indonesia pada Kabinet Pembangunan VII, bahkan menegaskan bahwa sekitar 50 persen dari pinjaman luar negeri yang sampai ke Indonesia masuk ke kantong pejabat. Padahal sebagian besar utang-utang luar negeri itu dibuat bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi karena "ada yang diajak patungan oleh perusahaan asing untuk mendapat-

kan pinjaman. Lalu, uangnya dibagi-bagi". (Gamma, 18 April 1999 hal. 59). Akibat dari itu semua, diperkirakan 70 persen dari kekuatan ekonomi nasional berada di tangan empat persen saja penduduk Indonesia, bahkan menjelang amruknya pemerintahan Orde Baru kelompok ini diperkirakan telah mendominasi 80 persen ekonomi nasional (Fajar et al, 1999). Gambaran ini menunjukkan bagaimana praktik KKN telah merugikan perekonomian bangsa, selain telah menumbuhkan rasa saling curiga, dan merusak rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam kehidupan masyarakat (Abdullah et al, 1999), juga telah merusak rasa percaya pada pejabat negara. Oleh karena itu, upaya untuk mengikis habis praktik KKN dalam kehidupan bangsa harus dilakukan secara serius dan terencana.

Dalam suasana yang memprihatinkan ini, bangsa Indonesia menghadapi tantangan berat dari luar, dengan berlangsungnya proses globalisasi yang telah memasuki pekarangan kehidupan kita. Teknologi informasi yang telah menyentuh kehidupan sebagian masyarakat Indonesia mengisyaratkan bahwa corak masyarakat informasi yang padat teknologi (Toffler, 1989) telah menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Dari wak-

tu ke waktu tingkat ketergantungan kita pada produk teknologi dan informasi akan semakin meninggi.

Tantangan masa depan yang dihadapi bangsa Indonesia memang cukup berat. Diperlukan berbagai upaya bersama untuk menghadapi tantangan itu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah upaya keras untuk menutup berbagai peluang bagi berlangsungnya praktik KKN. Sementara itu diperlukan pula upaya untuk meningkatkan saling percaya (*mutual trust*) dalam setiap tingkat struktur masyarakat. Menutup peluang KKN dan membangun rasa percaya itu tentu tidak mudah. Diperlukan berbagai upaya keras untuk mewujudkannya, antara lain adalah dengan menepati janji yang pernah diucapkan. Selama ini terlalu banyak janji-janji yang diobral pemerintah, tetapi jarang yang ditepati (Abdullah et al., 1999). Janji untuk memberantas KKN sudah sejak lama diucapkan, bahkan telah dituangkan dalam beberapa bentuk keputusan. Akan tetapi, janji itu tidak kunjung ditunaikan. Dalam suasana kampanye Pemilu sekarang ini sepatutnya para aktivitis partai jangan mengulangi kebohongan lama dengan mengobral janji-janji kosong kepada rakyat, karena akan lebih mengikis rasa sa-

ling percaya yang dibutuhkan untuk memulai membangun Indonesia baru.

Kehidupan bersama dalam bentuk persatuan dan kesatuan memang sangat dibutuhkan dalam kerangka memulihkan rasa saling percaya itu. Namun, persatuan dan kesatuan yang dibutuhkan bukan dalam makna menjadi serupa dan seragam, *uniformity* dan *sameness*, seperti terjadi dalam praktik kehidupan selama ini. Yang dibutuhkan adalah persatuan dan kesatuan dalam pengertian *unity* dan *oneness* (Covey, 1998). Dalam pengertian itu terjalin keinginan yang satu untuk mencapai tujuan yang satu pula. Kesatuan hati yang telah terjalin itu, menjadikan setiap komponen masyarakat merasa saling tergantung dan terikat untuk mewujudkan cita-cita itu. Namun, itu semua hanya akan dapat dicapai jika rasa saling percaya (*mutual trust*) dapat terjalin dengan baik. Sementara itu, aspek penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan berwibawa, tentu perlu pula diupayakan dengan serius guna menopang tercapainya tujuan itu. Sedapatnya kita dapat menghindarkan diri dari menjadi korban kemajuan yang telah kita capai selama ini.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, 1999. "Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): Sebuah pendekatan Kultural", dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed). *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, hal. 9-18.
- Abdullah et al, 1999. *Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, Bidang Sosial Budaya Budaya*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI.
- Appadurai, Arjun, 1991. "Disjuncture and Difference in Global Cultural Economy", dalam Mike Featherstone, (ed). *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity*. London: Sage Publication, hal.215-310.
- Bodley H. John, 1975. *Victims of Progress*. Menlo Park, California: Cummings Publishing Company.
- Booth, Anne dan Peter McCawley, 1981. *The Indonesian Economy During Soeharto Era*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Covey, Stephen R. 1998. "The Ideal Community" dalam Hasselbein et al (ed) *Community of the Future*. New York: Drucker Foundation, Future Series, hal.49-58.
- Ekeh, P.P., 1974. *Social Exchange Theory: the Two Traditions*. Cambridge: Harvard University Press.
- Dalton, George, 1968. *Primitive, Archaic and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi*. New York: Anchor Books.
- Douglas, Mary dan Isherwood, Baron, 1979. *The World of Goods*. London and New York: Basic Books.
- Fajar, Malik et al, 1999. *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden R.I.
- Featherstone, Mike, 1991. *Consumer Culture and Postmodernism*. London: Sage Publications.
- Feith, Herbert, 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Furnivall, J.S., 1948. *Colonial Policy and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gamma, 18 April 1999, "Wawancara: Pemborosan Memang Terjadi"
- Kayam, Umar, 1989. *Transformasi Budaya Kita*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru

- Besar Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 19 Mei 1989.
- Koentjaraningrat, 1969. *Rintang-an-Rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Bhra-tara.
- Kompas, 25 Maret 1999, "Berat-nya Beban Memakai Dasi".
- Muhammad, Mar'ie, 1999. "Ko-rupsi, Kolusi dan Nepo-teisme (KKN) dalam Birokrasi", dalam Edy Su-andi Hamid dan Muham-mad Sayuti (ed), *Menyingskap Korupsi, Kolusi dan Nepoteisme di Indone-sia*. Yogyakarta: Aditya Media, hal. 65-73.
- Noer, Deliar, 1990. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Raharjo, M. Dawam, 1999. "Ko-rupsi, Kolusi dan Ne-poteisme (KKN): Kajian Konseptual dan Kultural", dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed), *Menyingskap Korupsi, Kolusi dan Nepoteisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, hal. 19-32.
- Rais, M. Amien., 1999. *Kuasa, Tuna Kuasa, dan Demokra-tisasi Kekuasaan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas ISIPOL, Univer-sitas Gadjah Mada, 10 April 1999.
- Said, Edward E., 1993. *Culture and Imperialism*. New York: Alfred A. Knopp
- Sairin, Sjafrri, 1995. "Industrial-ization, Consumer Cul-ture and the Heartless So-cietiy". Makalah untuk Seminar Expanding Mar-ket and Culture di La-buan, Sabah, Malaysia, 17-19 Oktober 1995, dise-lenggarakan oleh Goethe Institute, Jakarta.
- Sairin, Sjafrri, 1999. "Korupsi, Kolusi dan Nepoteisme (KKN): Tinjauan Bu-daya", dalam Edy Suan-di hamid dan Muham-mad Sayuti (ed), *Menyingskap Korupsi, Kolusi dan Nepoteisme di Indone-sia*. Yogyakarta: Aditya Media, hal. 33-43.
- Toffler, Alvin, 1989. *The Third Wave*. New York: William Morrow and Company, Inc.
- Turner, Victor, 1976. *Ritual Pro-cess: Structure and Anti-Structure*. Ithaca: Cornell University Press.